

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

GIFRI ADITIA
2110012111011

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:36/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : GIFRI ADITIA
Npm : 2110012111011
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERANAN WALI NAGARI DALAM
PELAKSANAAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN
LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Nurbeti., S.H.,M.Hum (Pembimbing)



THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN IMPLEMENTING ROAD INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS IN AIR DINGIN NAGARI, LEMBAH GUMANTI DISTRICT, SOLOK REGENCY

Gifri Aditia,¹ Nurbeti, SH., M.Hum.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gifriaditya761@gmail.com

ABSTRACT

Road infrastructure development is a crucial aspect of village governance because it directly impacts community mobility and improves welfare. Normatively, West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Villages, Article 10, emphasizes that Village Heads are tasked with organizing village governance, implementing development, public services, community development, and community empowerment. The condition of road infrastructure in Air Dingin Nagari, Lembah Gumanti District, Solok Regency, remains damaged in several areas, hampering community social and economic activities. Based on these conditions, the research questions are as follows: 1) What is the role of the Village Head (Wali Nagari) in implementing road infrastructure improvements? 2) What obstacles have been encountered in implementing road infrastructure improvements in Air Dingin Village, Lembah Gumanti District, Solok Regency? 3) What efforts have been made to overcome these obstacles in implementing road improvements in Air Dingin Village, Lembah Gumanti District, Solok Regency? This research uses a sociological legal research method. Data were obtained through document studies and interviews, then analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The role of the Village Head (Wali Nagari) indicates that the Village Head has played a role in planning through village meetings, implementing road improvements, and overseeing the use of village funds. 2) The obstacles faced include budget limitations, geographical conditions, and suboptimal community participation. 3) The efforts made to overcome these obstacles include increasing transparency, cooperation, and community participation to ensure more effective and sustainable road infrastructure development.

Keywords: Wali Nagari, Air Dingin Village, Road Infrastructure.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari merupakan satuan wilayah administratif di bawah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai pengganti desa atau kelurahan. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Chairul Anwar, 1997) Secara struktural, nagari terdiri atas beberapa jorong dan dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang

dipilih melalui mekanisme musyawarah dan pemilihan oleh masyarakat.

Sistem pemerintahan nagari di Minangkabau memiliki kekhasan karena berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, di mana kepemilikan tanah ulayat dikelola secara bersama melalui musyawarah adat. Dalam struktur tersebut, Wali Nagari tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai adat serta penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari. (A.A. Navis, 1984) Kedudukan dan kewenangan Wali Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan publik, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat nagari.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok menghadapi berbagai kendala, terutama kondisi geografis berupa wilayah pegunungan yang rawan longsor dan banjir bandang.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor alam, kondisi geologi, serta kurang efektifnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah masih mengalami kerusakan yang cukup serius. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI NAGARI AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisis upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang berfokus pada data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan guna melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Maiyestati, 2022) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Air Dingin, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. (Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020) Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur, kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

(Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, Mutaqqin Nur, 2023)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Nagari Air Dingin terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 126,39 km² dan jumlah penduduk sekitar 10.770 jiwa yang terbagi dalam tujuh jorong. Kondisi jalan yang rusak sering menghambat mobilitas masyarakat sehingga peran Wali Nagari sangat penting dalam perbaikan infrastruktur jalan.

Pembangunan jalan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kemudian disusun rencana pembangunan yang dibahas dalam Musyawarah Nagari dan disesuaikan dengan anggaran. Pelaksanaan dilakukan melalui pembangunan fisik jalan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran pembangunan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran nagari yang belum mampu membiayai seluruh ruas jalan yang rusak, sehingga pemerintah

nagari harus menetapkan skala prioritas perbaikan. Selain itu, kondisi alam dan cuaca seperti curah hujan yang tinggi juga sering menghambat proses pengerjaan jalan.

Di samping faktor tersebut, perbedaan pendapat di tengah masyarakat mengenai penentuan lokasi jalan yang diprioritaskan turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Wali Nagari berperan penting dalam memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, mengatur pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi lapangan, serta mengelola perbedaan pendapat melalui komunikasi dan musyawarah agar perbaikan infrastruktur jalan dapat tetap berjalan dengan baik.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, faktor alam, serta perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

Selain itu, pada tahun 2021 hingga 2023 tidak dilakukan pembangunan infrastruktur akibat pandemi Covid-19, sehingga perbaikan baru kembali dilaksanakan pada tahun 2024 secara bertahap. Dalam mengatasi kendala tersebut, Wali Nagari berperan meningkatkan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat, menetapkan skala prioritas perbaikan jalan melalui musyawarah nagari.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Wali Nagari berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas masyarakat di Nagari Air Dingin.
2. Kendala utama dalam perbaikan jalan adalah keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang berbukit, curah hujan tinggi, serta perbedaan pendapat masyarakat mengenai prioritas pembangunan.
3. Upaya yang dilakukan yaitu menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan peran Wali Nagari dalam pengelolaan dana desa, serta mendorong partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih efektif dan transparan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Nagari: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya pembangunan infrastruktur.
2. Bagi Masyarakat Nagari: meningkatkan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Bagi Pemerintah Daerah: memberikan pendampingan dan pengawasan agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT.Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

Maiyestati, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.

Sumber Lain

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I.

Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, Mutaqqin Nur, 2023, METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA, hlm 4, Di Akses pada 17 Desember 2025 https://www.academia.edu/download/116532829/Metode_Pengumpulan_Data_Melalui_wawancara.pdf

UCAPAN TERIMAKASIH

kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing penulis memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H